



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2009 ;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1) ;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8) ;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9) ;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10) ;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11) ;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12) ;

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp 430.982.236.000,00 (Empat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 54.129.312.463,00 (Lima puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 485.111.548.463,00 (Empat ratus delapan puluh lima miliar seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| a. Semula | Rp | 348.175.682.000,00 |
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>21.247.691.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan | | Rp 369.423.373.000,00 |

| | | |
|---|----|--------------------------------|
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp | 430.982.236.000,00 |
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>54.129.312.463,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | | Rp 485.111.548.463,00 |
| Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan | | Rp <u>(115.688.175.463,00)</u> |

| | | |
|--|----|--------------------------|
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp | 88.306.554.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>42.381.621.463,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp 130.688.175.463,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp | 5.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>9.500.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp 15.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan | | Rp 115.688.175.463,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | | Rp 0,00 |

Pasal 2

| | | |
|--|----|--------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari : | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp | 38.991.171.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>11.138.863.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp 50.130.034.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp | 289.588.978.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>4.498.272.000,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp 294.087.250.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp | 19.595.533.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>5.610.556.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp 25.206.089.000,00 |

| | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan : | | | |
| a. Pajak Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 7.575.681.000,00 | |
| 2) Bertambah/ berkurang) | Rp | 487.500.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp | | 8.063.181.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 5.306.196.000,00 | |
| 2) Bertambah/ berkurang) | Rp | 499.433.000,00 | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp | | 5.805.629.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.697.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 103.253.000,00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp | | 1.800.253.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| 1) Semula | Rp | 24.412.294.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 10.048.677.000,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp | | 34.460.971.000,00 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan : | | | |
| a. Dana Bagi Hasil | | | |
| 1) Semula | Rp | 20.849.258.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.498.272.000,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp | | 25.347.530.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | | | |
| 1) Semula | Rp | 236.695.720.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp | | 236.695.720.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1) Semula | Rp | 32.044.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp | | 32.044.000.000,00 |

| | | | |
|--|----|------------------|-------------------|
| (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan : | | | |
| a. Hibah | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp | | 0,00 |
| b. Dana Darurat | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp | | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1) Semula | Rp | 9.167.371.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 3.128.556.000,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp | | 12.295.927.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.321.512.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan | Rp | | 1.321.512.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| 1) Semula | Rp | 9.106.650.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.482.000.000,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp | | 11.588.650.000,00 |

Pasal 3

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari : | | | |
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1) Semula | Rp | 206.564.763.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 20.824.192.463,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp | | 227.388.955.463,00 |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1) Semula | Rp | 224.417.473.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 33.305.120.000,00 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp | | 257.722.593.000,00 |

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : | | | |
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1) Semula | Rp | 192.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 13.702.114.463,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | | 205.702.114.463,00 |
| b. Belanja Bunga | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp | | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp | | 0,00 |
| d. Belanja Hibah | | | |
| 1) Semula | Rp | 4.878.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 3.093.500.000,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp | | 7.971.500.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 1) Semula | Rp | 8.880.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 3.428.578.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp | | 12.308.578.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp | | |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 1) Semula | Rp | 306.763.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 600.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp | | 906.763.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | | | |
| 1) Semula | Rp | 500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | | 500.000.000,00 |

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : | | | |
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1) Semula | Rp | 20.108.987.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 597.560.500,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | | 20.706.547.500,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 1) Semula | Rp | 61.551.550.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 9.669.980.000,00 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | | 71.221.530.000,00 |
| c. Belanja Modal | | | |
| 1) Semula | Rp | 142.756.936.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 23.037.579.500,00 | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp | | 165.794.515.500,00 |

Pasal 4

| | | | |
|--|----|---------------------|--------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari : | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | Rp | 88.306.554.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 42.381.621.463,00 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | | 130.688.175.463,00 |
| b. Pengeluaran. | | | |
| 1) Semula | Rp | 5.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 9.500.000.000,00 | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp | | 15.000.000.000,00 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : | | | |
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya. | | | |
| 1) Semula | Rp | 71.018.465.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 59.264.589.256,00 | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp | | 130.283.054.756,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 1) Semula | Rp | 17.288.088.500,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | (17.288.088.500,00) | |
| Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp | | 0,00 |

| | | | |
|--|----|------|------|
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | | Rp | 0,00 |

| | | | |
|---|-----|------|------|
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp | 0,00 |

| | | | |
|--|----|--------------|--------------|
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 2.097.500,00 | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | Rp | 2.097.500,00 |

| | | | |
|--|----|----------------|----------------|
| f. Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 403.023.207,00 | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | | Rp | 403.023.207,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

| | | | |
|--|----|------|------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | | Rp | 0,00 |

| | | | |
|---|----|------------------|-------------------|
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 4.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 9.500.000.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | Rp | 14.000.000.000,00 |

| | | | |
|--|----|------|------|
| c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | | Rp | 0,00 |

| | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan | | Rp | 1.000.000.000,00 |

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 20 November 2009

WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
Cap TTD
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19660908 199303 1 007